IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI NAGARI CUBADAK BARAT KECAMATAN DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN

Julia Hennika[1], Rahmadani Yusran[2]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : juliahennika@gmail.com[1], yusranrdy@fis.unp.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan penurunan stunting melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, dengan fokus pada variabel keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan STBM dalam upaya penurunan stunting di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap pemerintah nagari, petugas kesehatan, kader, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan didukung oleh keterlibatan kader dan tokoh masyarakat, meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi, serta adanya dukungan kelembagaan di tingkat nagari. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi yang belum optimal. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan publik di bidang kesehatan lingkungan, khususnya sebagai bahan evaluasi dan perumusan strategi penguatan kebijakan penurunan stunting berbasis STBM di tingkat nagari.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Stunting, STBM, Sanitasi, Masyarakat*

ABSTRACT

This study examines the implementation of stunting reduction policy through the Community-Based Total Sanitation (STBM) approach in Nagari Cubadak Barat, Dua Koto District, Pasaman Regency, focusing on the variables of success and failure in policy implementation. The objective of this research is to analyze the supporting and inhibiting factors affecting the effectiveness of STBM policy implementation in reducing stunting at the local level. This study employs a qualitative method with a descriptive approach, using data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and documentation involving village government officials, health workers, community cadres, and local residents. The findings indicate that policy implementation success is supported by the involvement of community cadres and local leaders, increasing public awareness of the importance of sanitation, and institutional support at the village level. However, several challenges remain, including ineffective communication, limited resources, weak cross-sectoral coordination, low community participation, and suboptimal monitoring and evaluation. This study contributes to the development of public policy implementation studies, particularly in environmental health, and provides practical insights for strengthening community-based stunting reduction policies at the village level.

Keywords : *Policy Implementation, Stunting, Community-Based Total Sanitation, Sanitation, Community*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat prioritas di Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi isu strategis pembangunan nasional. Stunting tidak hanya menyebabkan gangguan pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kemampuan kognitif, mutu sumber daya manusia, serta potensi produktivitas ekonomi individu di masa yang akan datang, seperti gangguan perkembangan kognitif, penurunan produktivitas, serta meningkatnya risiko penyakit degeneratif di masa dewasa. Dalam konteks global dan nasional, isu stunting semakin mendapat perhatian karena berkaitan erat dengan target pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek kesehatan dan kesejahteraan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 19,8%, menurun dari 21,5% pada tahun 2023. Meskipun menunjukkan tren positif, angka ini masih tergolong tinggi dan memerlukan upaya berkelanjutan lintas sektor untuk menurunkannya sesuai target nasional jangka menengah.

Berbagai studi menunjukkan bahwa stunting bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh faktor gizi, kesehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kekurangan asupan gizi merupakan faktor utama penyebab *stunting* ditambah dengan pola asuh ketersediaan makanan, kesehatan dan sanitasi lingkungan yang buruk (Rahayu, 2018). Secara empiris, sanitasi yang buruk dapat meningkatkan kejadian penyakit infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan gizi pada anak. Studi WHO menunjukkan bahwa penerapan praktik sanitasi yang baik dapat menurunkan kejadian penyakit berbasis lingkungan secara signifikan, sementara akses sanitasi yang layak berkontribusi terhadap penurunan stunting hingga sekitar 27%. Hal ini menegaskan bahwa intervensi sanitasi berbasis perilaku merupakan komponen penting dalam strategi percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Dengan demikian upaya penurunan stunting membutuhkan intervensi kebijakan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021, Pemerintah Indonesia memasukkan sanitasi sebagai salah satu strategi utama penurunan *stunting*. Strategi STBM stunting merupakan upaya jangka panjang yang saat ini bukan hanya sekedar suatu upaya pemberdayaan masyarakat yang terkait air dan sanitasi saja, atas dasar karena stunting bukan hanya karena kurang makan, maka STBM dikembangkan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan stunting yang dikenal STBM stunting.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan kebijakan nasional yang berdasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 yang kemudian dilanjutkan dengan Permenkes No 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan tujuan mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan anak-anak dalam taraf kehidupan yang lebih baik.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan dan paradigma sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat melalui penerapan lima pilar STBM, yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, serta pengamanan limbah cair rumah tangga. STBM dipandang strategis karena secara langsung menyasar akar permasalahan sanitasi lingkungan yang berkontribusi terhadap tingginya risiko penyakit infeksi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kejadian stunting.

Kabupaten Pasaman ditetapkan sebagai salah satu wilayah lokus stunting berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jumlah balita yang mengalami stunting di Kabupaten Pasaman mencapai 15.025 anak dengan prevalensi sebesar 55,2%. Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018, ditetapkan sepuluh nagari sebagai wilayah prioritas penanganan stunting di Kabupaten Pasaman. Nagari tersebut meliputi Nagari Binjai, Ladang Panjang, dan Malampah di Kecamatan Tigo Nagari; Nagari Ganggi Hilia dan Nagari Koto Kaciak di Kecamatan Bonjol; Nagari Panti di Kecamatan Panti; Nagari Koto Rajo di Kecamatan Rao Utara; Nagari Sungai Lolo di Kecamatan Mapattunggul Selatan; serta Nagari Cubadak dan Nagari Simpang Tonang di Kecamatan Dua Koto.

Setelah pelaksanaan intervensi penanganan stunting pada sepuluh nagari prioritas tersebut, pada tahun 2019 berdasarkan hasil survei pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, jumlah nagari yang ditetapkan sebagai lokus stunting di Kabupaten Pasaman meningkat menjadi 27 nagari. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat nagari lain yang memiliki tingkat permasalahan stunting cukup tinggi, sebagaimana yang sebelumnya terjadi pada sepuluh nagari yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanganan stunting, salah satu diantaranya adalah Nagari Cubadak Barat, yang juga merupakan salah satu lokus *stunting* yang berada di Kabupaten Pasaman tepatnya di Kecamatan Dua Koto. Berdasarkan data Puskesmas Cubadak jumlah anak stunting pada tahun 2019 sebanyak 173 anak, tahun 2020 139 anak, 2021 195 anak, tahun 2022 165 anak, dan pada tahun 2023 sebanyak 121 anak. Selanjutnya, untuk penanggulangan dalam tahap pelaksanaan stunting ini unsur pemerintahan yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman ke Pemerintah Nagari belum terealisasi dengan baik.

Strategi STBM-Stunting merupakan solusi yang dapat di laksanakan dalam penyelesaian permasalahaan yang ada di Nagari Cubadak Barat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan penurunan stunting berbasis STBM di tingkat lokal tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kebijakan penurunan stunting melalui pendekatan STBM telah dilaksanakan, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Banyak hal yang masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaanya, misalnya rendahnya kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana sanitasi, lemahnya koordinasi dan sinergi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas pelaksana, dan keterbatasan monitoring dan evaluasi. Mengingat masih banyaknya permasalahan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting sanitasi total berbasis masyarakat di Nagari Cubadak Barat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman yang dilaksanakan berdasarkan Perbup No. 8 Tahun 2020 Tentang sanitasi Total Berbasis masyarakat. Maka artikel ini akan menunjukkan apa saja variabel pendukung dan penghambat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting sanitasi total berbasis masayarakat di Nagari Cubadak Barat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta penelaahan dokumen yang melibatkan beberapa dinas, instansi terkait, dan pihak-pihak yang berperan di Nagari Cubadak Barat,

Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai waktu pengumpulan data, informan yang berbeda, serta penggunaan instrumen yang beragam dengan membandingkan dan mengecek ulang untuk kebenaran data yang diperoleh (Moleong & Lexy J., 2013), kemudian analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh kejelasan peraturan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel pelaksanaannya. Dalam implementasi kebijakan publik, diperlukan koordinasi, komunikasi dan partisipasi dari pemerintah dan masyarakat yang terlibat (Howlett, 2018). Menurut (Marume, 2016), implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan yang dijalankan berdasarkan ketetapan sebelumnya yang melibatkan berbagai sektor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III dalam (Mulyadi, 2015), Untuk mewujudkan kinerja implementasi kebijakan yang optimal, diperlukan proses internalisasi yang dilakukan secara terpadu, selaras, dan berkesinambungan dengan empat variabel yang saling berhubungan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks kebijakan penurunan stunting sanitasi total berbasis masyarakat di Nagari Cubadak Barat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman yang dilaksanakan berdasarkan Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan beberapa pihak terkait.

Pemerintah Nagari Cubadak Barat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan penurunan stunting melalui sanitasi total berbasis mayarakat melakukan berbagai kegiatan berupa: pelaksanaan melalui penerapan lima pilar STBM dengan pemicuan masyarakat, pelaksanaan melalui lintas sektor, pelaksanaan melalui penguatan kelembagaan, regulasi lokal, monitoring dan evaluasi, dan pelaksanaan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan terdapat beberapa variabel yang menjadi pendukung keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting berbasis STBM di Nagari Cubadak Barat yaitu:

Pertama, adanya komitmen pemerintah nagari dan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Pemerintah nagari secara aktif mendukung kegiatan STBM melalui keterlibatan aparat nagari dalam kegiatan sosialisasi, penyediaan forum musyawarah, pengalokasian dana, serta integrasi program sanitasi dengan kegiatan posyandu dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Komitmen ini tercermin dari keterlibatan langsung perangkat nagari dan petugas puskesmas dalam memberikan edukasi, pemicuan dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan masyarakat terkait sanitasi dan kaitannya dengan stunting.

Kedua, peran kader dan tokoh masyarakat turut menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi. Kader posyandu dan tokoh adat berfungsi sebagai penggerak perubahan perilaku masyarakat melalui kegiatan pemicuan, khususnya dalam mendorong penerapan pilar-pilar STBM. Keberadaan tokoh yang dihormati di tengah masyarakat mempermudah proses penerimaan kebijakan dan meningkatkan legitimasi program di tingkat akar rumput.

Ketiga, meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan kesehatan lingkungan juga menjadi indikator keberhasilan. Sebagian masyarakat telah menunjukkan perubahan perilaku, seperti tidak lagi melakukan buang air besar sembarangan, mulai membangun jamban keluarga, serta menerapkan praktik kebersihan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini juga terlihat dari meningkatnya perhatian terhadap penggunaan jamban sehat, pengelolaan air minum aman, dan kebersihan lingkungan. Perubahan ini menunjukkan bahwa pesan kebijakan STBM mulai dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat.

Keempat, adanya program dan kebijakan pendukung. Keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Nagari Cubadak Barat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan program dan kebijakan pendukung yang saling melengkapi. Kebijakan STBM tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan kesehatan dan sosial yang telah berjalan di tingkat nagari, kecamatan, hingga kabupaten. Integrasi ini menjadi salah satu faktor kunci yang memperkuat pelaksanaan kebijakan di lapangan. Perbup No. 8 tahun 2020 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan. Program dan kebijakan tersebut memberikan arah, legitimasi, serta dukungan operasional bagi pelaksana kebijakan, sehingga tujuan kebijakan lebih mudah dicapai dan berkelanjutan di tingkat masyarakat.

2. Variabel Kegagalan Implementasi Kebijakan

Di samping faktor keberhasilan, hasil penelitian juga menemukan berbagai kendala yang menyebabkan implementasi kebijakan penurunan stunting berbasis STBM belum berjalan secara optimal.

Pertama, Komunikasi yang tidak efektif. Masih terdapat ketimpangan pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat STBM. Sosialisasi program belum merata baik dari sisi jangkauan maupun frekuensi, sehingga informasi program belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

Kedua, keterbatasan sumber daya**.** baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana, menjadi faktor penghambat utama. Jumlah petugas dan kader yang terbatas, menyebabkan pendampingan kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan. Ketersediaan sarana BABS yang masih minim, anggaran dana untuk pembangunan air bersih masih mengadalkan dana alokasi khusus, oleh karena itu keterbatasan anggaran nagari berdampak pada minimnya dukungan fasilitas sanitasi bagi masyarakat kurang mampu. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana sanitasi, serta dukungan teknis menjadi hambatan dalam implementasi STBM. Kondisi ini mempengaruhi kualitas pelaksanaan program serta efektivitas penyampaian perubahan perilaku kepada masyarakat.

Ketiga, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam pelaksanaan program STBM masih menjadi permasalahan serius. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap apatis dan menganggap sanitasi sebagai urusan pribadi, bukan tanggung jawab bersama. Masyarakat merasa jika posyandu dan kegiatan seperti edukasi dan penyuluhan tidak penting. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan lama, tingkat pendidikan, serta kondisi ekonomi yang membatasi kemampuan masyarakat untuk membangun fasilitas sanitasi yang layak.

Keempat, rendahnya komitmen pelaksana dan lemahnya koordinasi lintas sektor turut mempengaruhi kegagalan implementasi kebijakan. Sektor lain seperti pemerintah nagari dan kecamatan bahkan dinas terkait masih menganggap bahwa pencegahan dan penurunan stunting adalah fokus kerja puskesmas dan bidan desa beserta kadernya. Kerja sama antara pemerintah nagari, sektor kesehatan, dan sektor terkait lainnya belum berjalan secara optimal dan cenderung

bersifat sektoral. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan belum terintegrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kelima, monitoring dan evaluasi yang belum optimal menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak terpantau secara sistematis. Evaluasi kegiatan STBM masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek perubahan perilaku masyarakat secara mendalam. Karena hal ini mengakibatkan sulitnya mengidentifikasi secara dini permasalahan implementasi dan merumuskan langkah perbaikan yang tepat.

Keenam, partisipasi masyarakat rendah, disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan perilaku hidup bersih kurang, juga karena minimnya masyarakat yang hadir ketika kegiatan sosialisasi mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai keterkaitan antara sanitasi dan stunting sehinga program belum memberikan dampak yang optimal terhadap penurunan stunting.

Implementasi kebijakan penurunan stunting berbasis STBM di Nagari Cubadak Barat merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkaitan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas pelaksana, dukungan kelembagaan, serta penerimaan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keberhasilan yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan pandangan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya komitmen aktor pelaksana dan dukungan lingkungan sosial. Keterlibatan aktif pemerintah nagari, tenaga kesehatan, serta kader dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan lebih mudah diimplementasikan ketika terdapat kepemimpinan lokal yang kuat dan mampu membangun kepercayaan masyarakat. Perubahan perilaku sebagian masyarakat juga mengindikasikan bahwa pendekatan partisipatif STBM memiliki potensi besar dalam mendorong upaya pencegahan stunting berbasis komunitas. Namun demikian, temuan terkait kegagalan implementasi menunjukkan bahwa pendekatan STBM masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa perubahan perilaku sanitasi tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi, tetapi memerlukan dukungan nyata berupa fasilitas, insentif, dan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, lemahnya koordinasi lintas sektor memperlihatkan bahwa penanganan stunting belum sepenuhnya dipahami sebagai isu lintas bidang yang membutuhkan sinergi antarinstansi. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal juga menjadi kelemahan utama dalam implementasi kebijakan. Tanpa mekanisme evaluasi yang komprehensif, pelaksanaan kebijakan berisiko berjalan secara rutinitas tanpa perbaikan berkelanjutan. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan penurunan stunting dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting berbasis STBM sangat ditentukan oleh keseimbangan antara faktor pendukung dan faktor penghambat. Upaya penguatan kapasitas pelaksana, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta perbaikan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di tingkat nagari.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Variabel keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting sanitasi total berbasis masyarakat di Nagari Cubadak barat Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman dapat disimpulkan bahwa dalam penurunan stunting ditemukan variabel keberhasilan dan kegagalan. Adapun variabel keberhasilannya yaitu: adanya komitmen pemerintah nagari dan tenaga kesehatan**,** peran kader dan tokoh masyarakat**,** meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan kesehatan lingkungan**,** dan adanya program dan kebijakan pendukung. Sedangkan Variabel Kegagalan Implementasi Kebijakan yaitu: komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya**,** rendahnya partisipasi sebagian masyarakat**,** rendahnya komitmen pelaksana dan lemahnya koordinasi lintas sektor serta monitoring dan evaluasi yang belum optimal

DAFTAR PUSTAKA

Erlani, E., Sahabuddin, Q., & Juherah, J. (2025). Hubungan Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan Kejadian Stunting di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Sulawesi Barat . *Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika Dan Masyarakat*, *25*(1), 27–39.

Gusmiati, Rika, dkk. (2024). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Stunting melalui Pembentukan Pos Sanitasi Total Berbasis Masyarkat. Jurnal Abdidas, 5 (6), 825 – 833.

Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting berbasis nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*, *5*(3), 293-300.

Kumara, Yasinta. Dkk. (2023). Hubungan antara Kondisi Lima Pilar STBM (Sanitasi Total BerbasisHubungan antara Kondisi Lima Pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dengan Kejadian Stunting di Wilayah Kabupaten Madiun. JPKM: Jurnal Profesi Kesehatan Masyarakat, 4(2), 129-145.

Marume, S. B. M., Mutongi, C., & Madziyire, N. C. (2016). An Analysis of Public Implementation. IOSR Journal of Business and Management, 18 (4): 86-93.

Moleong, & Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Roasdakarya.

Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Kementerian Kesehatan RI. (2018). Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. Jakarta

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A., & Anggraini, L. (2018). Study Guide Stunting dan Upaya Pencegahannya (Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat). Yogyakarta: Cv. Mine.

Rahmuniyati, M. E., & Sahayati, S. (2023). Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Mengurangi Kasus Stunting Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Sleman. *Prepotif : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *5*(1), 80–95.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zikri, Q., Yusran, R., Malau, H., & Permana, I. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7 (2): 3815-3820.